

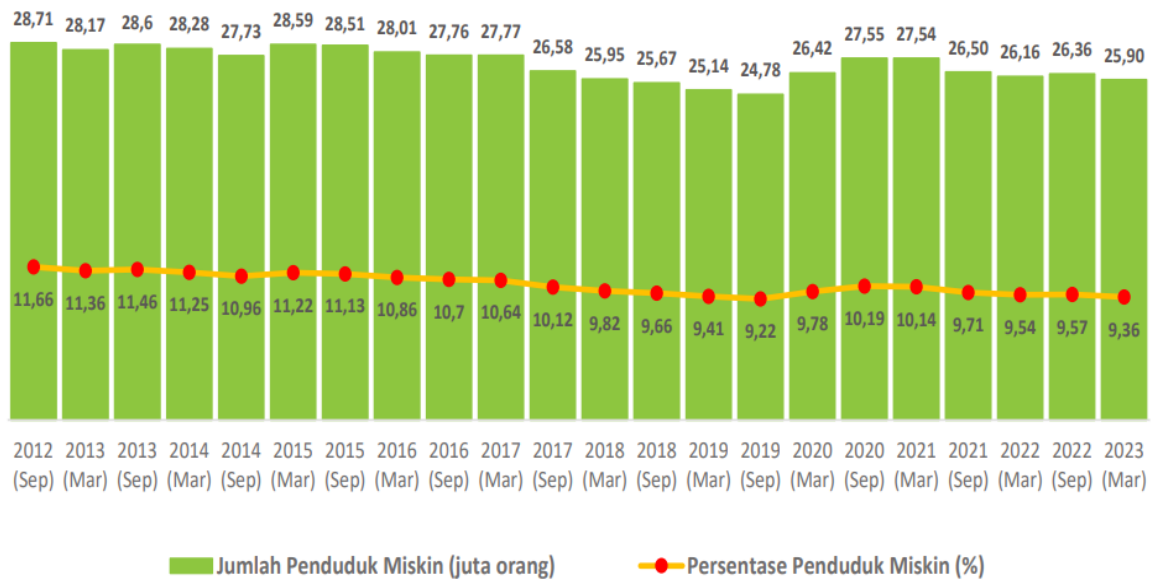
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan ekstrem masih menjadi masalah utama bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Penyebab mendasar dari kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, papan dan pangan menurut Maipita dan Fitrawaty (dalam Okuputra & Nasikh, 2022). Bappenas menjelaskan bahwa kemiskinan adalah keadaan di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses untuk memenuhi hak-hak dasar yang diperlukan untuk menjalani hidup dengan martabat. Hak-hak dasar ini meliputi akses terhadap kebutuhan mendasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta lingkungan yang baik. Selain itu, penting juga bagi mereka untuk merasa aman dari ancaman dan kekerasan, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mengingat kompleksitas masalah ini, pemerintah menyadari perlunya tindakan nyata untuk mengatasi kemiskinan. Contohnya, dengan memberikan insentif langsung kepada golongan masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk uang tunai (Wulansari et al., 2023).

**Grafik 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia,
September 2012–Maret 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan grafik 1.1, terlihat bahwa pada Maret 2023, persentase penduduk miskin mencapai 9,36%. Bandingkan dengan Maret 2022, di mana persentase penduduk miskin sebesar 9,54%, dan pada Maret 2021, persentase tersebut tercatat sebesar 10,14%. Terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 11,66% pada September 2012 menjadi 9,36% pada Maret 2023. Data menunjukkan grafik kemiskinan di Indonesia bersifat fluktuatif cenderung stabil. Meskipun data tersebut menunjukkan adanya penurunan, tingkat kemiskinan di Indonesia tetap tergolong cukup tinggi. Dalam sudut pandang administrasi publik, isu kemiskinan sering kali menjadi fokus perhatian baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan oleh perannya sebagai salah satu faktor yang memicu munculnya masalah sosial, serta dampaknya terhadap rendahnya kualitas hidup masyarakat, terutama di sektor pendidikan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatasi masalah kemiskinan melalui penerapan beberapa program perlindungan sosial. Salah satu inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah ialah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang sebagai strategi untuk menangani isu-isu sosial dan merupakan bentuk bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CBT*) yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. PKH ialah program yang berdedikasi untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan keuangan yang bersyarat kepada keluarga miskin sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan mempersiapkan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak mereka (Latare et al., 2023).

PKH diutamakan untuk keluarga yang mengalami kemiskinan dan ketidakmampuan, yang mempunyai anggota keluarga seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak yang sedang menempuh sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Tidak hanya itu, program ini juga meliputi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia yang terdaftar dalam DTKS. Jumlah bantuan PKH bervariasi tergantung pada situasi masing-masing keluarga. Pembayaran bantuan ini dilakukan setiap bulan atau setiap tiga sampai empat bulan, tergantung pada peraturan yang berlaku di daerah setempat. Bantuan ini akan diberikan kepada KPM selama mereka memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut antara lain adalah memastikan anak-anak mereka bersekolah, mendapatkan vaksinasi, dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin (Latare et al., 2023).

Tujuan dari Program Keluarga Harapan salah satunya ialah untuk mempermudah akses pendidikan sehingga dapat memperbaiki taraf hidup keluarga penerima manfaat. Dengan memberikan dukungan, program ini berperan dalam memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa melanjutkan pendidikan mereka dan menyelesaikan sekolah dengan baik. Dengan pendidikan yang lebih baik, anak-anak tersebut akan mendapatkan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada mereka untuk membantu keluarga mereka keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Monika et al., 2019).

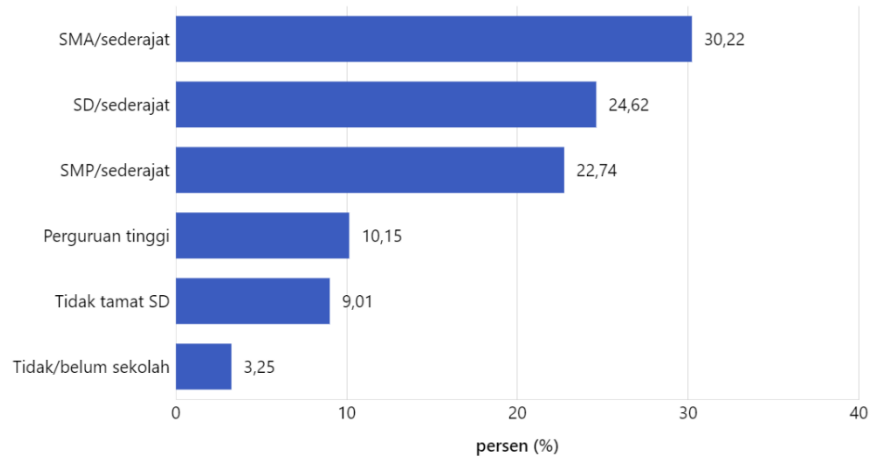
Pada tahun 2019, bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dibagi menjadi dua kategori utama: bantuan tetap dan bantuan berdasarkan komponen keluarga. Untuk bantuan tetap, setiap keluarga akan menerima Rp 550.000,- per tahun untuk kategori reguler, atau Rp 1.000.000,- per tahun untuk kategori PKH Akses (Kemensos.go.id. diakses pada tanggal 13 Juni 2024).

Sementara itu, bantuan berdasarkan komponen keluarga mencakup sejumlah alokasi yang lebih spesifik, seperti Rp 2.400.000,- per tahun untuk ibu hamil dan anak usia dini, Rp 900.000,- per tahun untuk anak di tingkat sekolah dasar, Rp 1.500.000,- per tahun untuk sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas Rp 2.000.000,- per tahun. Bantuan ini juga mencakup Rp 2.400.000,- per tahun untuk penyandang disabilitas berat dan orang lanjut usia. Melalui struktur bantuan ini, keluarga penerima manfaat dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup.

Pada bidang pendidikan, keluarga penerima PKH berkewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak mereka yang berusia wajib belajar menghadiri kelas paling tidak 85% dari total hari sekolah yang sebenarnya. Hal ini juga diterapkan untuk anak-anak yang berada dalam periode wajib belajar selama 12 tahun, yang mencakup pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Diharapkan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dapat memperoleh akses pendidikan yang layak sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses dan partisipasi pendidikan (Monika et al., 2019).

Masyarakat menengah ke bawah di Indonesia masih banyak yang terkendala dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak (Saputra & Lubis, 2023). Hal ini disebabkan biaya pendidikan yang terus meningkat menjadi salah satu hambatan utama bagi masyarakat kurang mampu. Biaya untuk buku, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya sering kali menjadi beban yang tidak tertahankan bagi keluarga. Banyak keluarga di bawah garis kemiskinan yang lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal daripada pendidikan (Laksana, 2021). Bagi mereka, pendidikan dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang tidak mendesak. Banyak orang yang kurang mampu tidak menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Mereka beranggapan bahwa pendidikan bukanlah jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga mereka lebih memutuskan untuk mempekerjakan anak-anak mereka guna mendukung perekonomian keluarga (Zulfikar & Dewi, 2021).

Grafik 1.2 Proporsi Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 tahun ke Atas (Maret 2023) di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan grafik 1.2, dapat dilihat bahwa pada Maret 2023, jumlah lulusan dengan pendidikan tertinggi berasal dari sekolah menengah, mencapai persentase 30,22%. Sementara itu, jumlah lulusan terbanyak kedua datang dari sekolah dasar, dengan persentase 24,62%. Posisi ketiga diisi oleh lulusan dari sekolah menengah pertama, yang mencatat persentase sebesar 22,74%. Komponen dana Program Keluarga Harapan yang diberikan pemerintah sebagian besar disalurkan untuk bidang pendidikan baik itu SD, SMP dan SMA. Harapannya bagi masyarakat yang kurang mampu dapat membantu mengurangi beban keluarga dalam menyekolahkan anak mereka sehingga setelah lulus SMA atau sederajat dapat memperoleh pekerjaan yang layak untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik.

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berfokus pada membantu keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial, tetapi juga berperan penting dalam mendorong penerima PKH untuk

memanfaatkan program-program lain secara berkelanjutan. Program ini juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian keluarga dalam mengakses layanan yang diperlukan sehingga mereka dapat lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan (Kementerian Sosial RI, 2021). Total keluarga yang mendapatkan manfaat mengalami peningkatan sejak diperkenalkannya PKH pada tahun 2007. Dimulai dari pelaksanaan program yang terbatas di tujuh provinsi pada tahun 2007, PKH telah mengalami pertumbuhan yang pesat hingga tahun 2020. Program ini kini sudah dijalankan di seluruh 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 514 kabupaten/kota dan 6.709 kecamatan (Kementerian Sosial RI, 2021). Kabupaten Sukoharjo, sebagai salah satu tempat di mana Program Keluarga Harapan (PKH) diimplementasikan, termasuk dalam bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan pendidikan di kawasan tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk yang Bekerja berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

No	Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1	Tidak/belum sekolah	2.632	0,98	7.208	3,13	9.840	1,97
2	Belum Tamat SD/ sederajat	4.650	1,73	8.160	3,55	12.810	2,57
3	Tamat SD/ sederajat	70.850	26,34	70.687	30,74	141.537	28,37
4	SLTP/ sederajat	52.891	19,66	40.463	17,59	93.354	18,71
5	SLTA/ sederajat	104.126	38,71	69.016	30,01	173.142	34,70
6	Diploma I/II	1.488	0,55	1.838	0,80	3.326	0,67
7	Akademi/DIII/Sarjana Muda	7.954	2,96	9.439	4,10	17.393	3,49
8	Diploma IV/Strata I	22.245	8,27	21.681	9,43	43.926	8,80
9	Strata II	1.966	0,73	1.425	0,62	3.391	0,68
10	Strata III	164	0,06	68	0,03	232	0,05
	Jumlah	268.966	100,00	229.985	100,00	498.951	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

Dengan didasarkan tabel 1.1, memperlihatkan bahwasanya di Kabupaten Sukoharjo jumlah penduduk yang bekerja paling besar tamat SLTA/ sederajat sebanyak 173.142 jiwa (34,70%) diikuti tamat SD/ sederajat sebanyak 141.537 jiwa (28,37%) dan tamat SLTP/ sederajat 93.354 jiwa (18,71%). Pendidikan mempunyai peran yang krusial dalam peningkatan kualitas hidup dan membuka kesempatan kerja di Kabupaten Sukoharjo. Peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan bagi semua kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu, perlu terus diupayakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh sebab itu, pada Program Keluarga Harapan pemerintah memberikan komponen dana yang lebih besar di bidang pendidikan supaya peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo 2018-2023

Kemiskinan	Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Miskin (000 jiwa)	65.43	63.55	68.89	73.84	68.72	68.79
Persentase Penduduk Miskin (P0)	7.41	7.14	7.68	8.23	7.61	7.58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

Dengan didasarkan tabel 1.2, pada tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo mencapai 68,89 ribu jiwa, yang setara dengan 7,68% dari total populasi. Peningkatan ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak sektor ekonomi mengalami penurunan sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan, mencapai 73,84 ribu jiwa atau 8,23% dari

total populasi. Fenomena ini mencerminkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 masih banyak orang rasakan.

Namun, pada tahun 2022, jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo mulai terlihat menurun, menjadi 68,72 ribu jiwa atau setara dengan 7,61% dari total populasi. Penurunan ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam mengelola dampak pandemi Covid-19 mulai memperlihatkan hasil yang baik. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo terlihat menurun secara signifikan, mencapai angka 68,79 ribu jiwa atau sekitar 7,58% dari total populasi. Hal ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo mulai menunjukkan perkembangan yang positif.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi antara tahun 2018 dan 2023. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 68.790 jiwa, jumlah ini berarti 7.58% dari keseluruhan penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,17% dengan periode antara tahun 2018 dengan tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kecamatan Polokarto Semester 2 Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
Tidak/Belum Sekolah	18.716	21,30%
Belum Tamat SD/Sederajat	9.893	11,26%
Tamat SD/Sederajat	20.351	23,16%
SLTP/Sederajat	17.793	20,25%
SLTA/Sederajat	16.550	18,84%
Tamat D1/D2/D3	1.493	1,70%
Tamat S1/S2/S3	3.057	3,48%
Total	87.853	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Dengan didasarkan tabel 1.3, Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi sekolah di Kecamatan Polokarto masih ada pada kategori rendah, hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya penduduk di Kecamatan Polokarto yang hanya memiliki tamatan sekolah dasar atau sederajat dengan persentase mencapai 23,16%. Kemudian disusul oleh penduduk yang tidak atau belum sekolah dengan persentase sebanyak 21,30%, serta dengan tingkat pendidikan SLTP (20,25%) dan SLTA (18,84%). Hal tersebut memberitahukan bahwasannya Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan capaian pendidikan di Kecamatan Polokarto. PKH dapat membantu memberikan dukungan finansial dan motivasi kepada keluarga miskin supaya anak-anak mereka dapat terus bersekolah hingga tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang hanya memiliki pendidikan rendah atau tidak bersekolah sama sekali (Saputra & Lubis, 2023).

Untuk meningkatkan pendidikan, sangat penting untuk memperbaiki pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, masih ada banyak

penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sehingga tidak semua keluarga yang benar-benar membutuhkan mendapatkan dukungan yang seharusnya. Hal ini tentu menghambat upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses ke pendidikan yang memadai. Ketidakmampuan untuk menjangkau layanan pendidikan yang baik dapat menghambat perkembangan mereka sehingga mengurangi peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan memperbaiki sistem penyaluran dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang berhak, diharapkan program ini dapat lebih efektif dalam membantu meningkatkan pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Upaya ini akan sangat membantu bagi masa depan anak-anak dan generasi mendatang, memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk meraih cita-cita mereka. Pemerintah harus secara serius memvalidasi warga penerima bantuan untuk memastikan mereka tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, penerima bantuan PKH sering kali tidak memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan program sehingga diperlukan perhatian lebih agar bantuan tersebut dapat mendukung peningkatan pendidikan secara efektif (Sulfadli et al., 2023).

Tabel 1.4 Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah dan Presentase KPM PKH									
		Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1	Weru	2.421	8,53%	2245	8,44%	2460	8,61%	2478	8,42%	2876	8,53%
2	Bulu	1.706	6,01%	1593	5,99%	1679	5,87%	1727	5,87%	2119	6,28%
3	Tawang Sari	2.511	8,85%	2329	8,75%	2541	8,89%	2445	8,31%	2920	8,66%
4	Sukoharjo	2.864	10,09%	2687	10,10%	2729	9,55%	2508	8,52%	3350	9,93%
5	Nguter	2.449	8,63%	2330	8,76%	2537	8,88%	2491	8,47%	2543	7,54%
6	Bendosari	1.731	6,10%	1629	6,12%	1757	6,15%	1869	11,47%	2193	6,50%
7	Polokarto	3.353	11,81%	3115	11,71%	3529	12,35%	3374	11,47%	3761	11,15%
8	Mojolaban	2.969	10,46%	2802	10,53%	2977	10,42%	2986	10,15%	3500	10,38%
9	Grogol	3.141	11,06%	2948	11,08%	3066	10,73%	3671	12,47%	3702	10,97%
10	Baki	1.924	6,78%	1808	6,80%	1906	6,67%	1998	6,79%	2215	6,57%
11	Gatak	1.595	5,62%	1497	5,63%	1638	5,73%	1877	6,38%	2029	6,02%
12	Kartasura	1.723	6,07%	1623	6,10%	1761	6,16%	2003	6,81%	2524	7,48%
Jumlah		28.387	100,0%	26.606	100,0%	28.580	100,0%	29.427	100,0%	33.732	100,0%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 (Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 1.4, bisa dilihat bahwasanya persentase KPM PKH di Kecamatan Polokarto tahun 2022 mencapai 11,15%. Nilai persentase ini merupakan yang paling tinggi di antara 12 kecamatan lainnya. Pada tahun 2022, Kecamatan dengan persentase KPM PKH terbanyak di Kabupaten Sukoharjo adalah Kecamatan Polokarto dengan persentase sebesar 11,15%. Diikuti oleh Kecamatan Grogol dengan persentase sebesar 10,97% dan Kecamatan Mojolaban dengan persentase sebesar 10,4%. Hal tersebut menandakan bahwasanya masih banyak keluarga di Kecamatan Polokarto yang membutuhkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terutama di bidang pendidikan. Oleh karena itu, peneliti memilih Kecamatan Polokarto sebagai tempat dalam penelitian ini.

Berdasarkan data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Kecamatan Polokarto, persentase KPM PKH pada tahun 2022 mencapai 11,15%, yang merupakan angka tertinggi di antara 12 kecamatan lainnya di Kabupaten Sukoharjo. Ini menunjukkan bahwa banyak keluarga di Kecamatan Polokarto masih memerlukan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam bidang pendidikan.

Kecamatan Polokarto masih menghadapi tantangan besar dalam bidang pendidikan. Data menunjukkan bahwa banyak penduduk di wilayah ini yang hanya memiliki pendidikan setingkat sekolah dasar atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Persentase penduduk dengan tamatan SD mencapai 23,16%, sementara yang tidak atau belum sekolah sebesar 21,30%. Ini berarti lebih dari 44% penduduk di Polokarto memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Keterkaitan antara angka KPM PKH dan tingkat pendidikan sangat jelas. Keluarga yang terdaftar dalam program ini umumnya berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu sehingga berpotensi mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Dengan tingginya persentase penduduk yang hanya memiliki tamatan SD dan mereka yang putus sekolah, bantuan dari PKH sangat diperlukan untuk mendukung pendidikan anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan beberapa tahun di Kecamatan Polokarto, tingkat pendidikan yang rendah masih menjadi

tantangan. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor ekonomi keluarga yang masih terbatas sehingga meskipun ada bantuan, banyak keluarga yang lebih memprioritaskan anak-anak untuk membantu orang tua bekerja daripada melanjutkan sekolah. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan jangka panjang juga memengaruhi keputusan orang tua untuk tidak mendorong anak-anak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Tabel 1. 5 KPM PKH Kecamatan Polokarto Tahun 2024

Desa	Jumlah Peserta	Komponen Kesehatan		Komponen Pendidikan			Komponen Kesejahteraan Sosial	
		Hamil	AUD	SD	SMP	SMA	Lansia	Disabilitas
Bakalan	153	0	8	40	24	40	98	6
Bugel	124	0	4	38	30	25	69	8
Bulu	122	0	5	26	21	15	109	4
Genengsari	148	1	10	37	26	30	100	5
Godog	200	0	8	51	53	48	138	9
Jatisobo	158	0	5	30	36	27	97	11
Karangwuni	109	0	6	21	30	27	66	13
Kayuapak	164	0	11	48	42	43	88	10
Kemasan	162	0	12	44	35	30	118	13
Kenokorejo	143	0	5	26	17	24	116	12
Mranggen	395	0	44	122	99	87	214	19
Ngombakan	158	0	8	48	42	41	82	7
Polokarto	200	1	9	51	39	28	148	12
Pranan	68	0	1	21	23	16	33	6
Rejosari	107	0	10	25	22	19	87	8
Tepisari	86	0	6	29	14	20	53	5
Wonorejo	162	0	5	51	40	47	93	4
Jumlah	2659	2	157	708	593	567	1709	152

Sumber: PPKH Kecamatan Polokarto

Pada tabel 1.5 di Kecamatan Polokarto, terdapat 1.868 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdaftar di sektor pendidikan. Rincian dari jumlah ini menunjukkan bahwa 708 KPM berasal dari tingkat sekolah dasar, 593 KPM dari sekolah menengah pertama, dan 567 KPM

dari sekolah menengah atas. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga-keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Dengan adanya dukungan dari PKH, diharapkan anak-anak dapat mengakses pendidikan yang lebih baik sehingga meningkatkan peluang mereka untuk masa depan yang lebih cerah. Program ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Pemerintah sangat berharap agar Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk memutus mata rantai kemiskinan, khususnya di kalangan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam gaya hidup dan perilaku mereka, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Namun, tidak hanya PKH yang perlu dievaluasi, penting juga untuk memahami bagaimana program ini diimplementasikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Polokarto. Dalam konteks ini, penelitian berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Pendidikan di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo” diambil sebagai langkah untuk mengeksplorasi efektivitas program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dampak PKH dan bagaimana program ini dapat lebih baik lagi dalam membantu masyarakat mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingginya angka putus sekolah menyebabkan banyaknya penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, hal ini menciptakan rantai kemiskinan yang sulit diputus.
2. Tingginya persentase KPM PKH menunjukkan bahwa banyak keluarga masih bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses pendidikan.
3. Masih ada persepsi di kalangan masyarakat bahwa pendidikan tidak terlalu penting. Maka dari itu, anak-anak tidak didorong untuk melanjutkan sekolah. Kesulitan ekonomi menjadi penghalang utama bagi keluarga untuk menyekolahkan anak-anak mereka sehingga banyak anak terpaksa putus sekolah untuk membantu perekonomian keluarga.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan akses pendidikan di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa saja masalah yang muncul pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan akses pendidikan di wilayah Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo?

1.4 Tujuan Penelitian

Menganalisis evaluasi hasil Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan akses pendidikan di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo serta mengidentifikasi masalah yang muncul pada pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan akses pendidikan di wilayah Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Harapan besar dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu administrasi publik. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk studi lain.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pemahaman dan pengetahuan peneliti sesuai dengan bidangnya.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini berguna untuk memberikan tambahan hasil penelitian kepada universitas serta acuan untuk penelitian sejenis bagi mahasiswa.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai masukan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam pembaharuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di waktu yang akan datang.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Febrian, W. D., Zulhaida, & Ilosa, A. (2020). <i>Jurnal Manajemen Kompeten</i> , 2(2), 66–74.	Mengetahui cara Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan di Nagari Tanjuang Bungo, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, serta mempelajari tantangan- tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut.	Kualitatif	Di Nagari Tanjuang Bungo, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan dengan baik. Namun, meskipun program ini seharusnya menjangkau banyak orang, masih ada sejumlah individu yang berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) namun tidak mendapatkannya, disebabkan oleh proses identifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih perlu perbaikan.
2.	Yandra, A., Setiawan, H., Sella, N., Prihati, P., & Derin, T. (2020). <i>Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan</i> , 19(2), 168–176.	Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, telah melalui proses evaluasi dan didiskusikan.	Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, di Kota Pekanbaru, dan jumlah bantuan yang diberikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, karena masih ada beberapa rumah tangga berpenghasilan rendah yang tidak menerima dana bantuan

				PKH, warga Kelurahan Sri Meranti tetap percaya bahwa bantuan tersebut tidak merata.
3.	Alexandri, M. B. (2020). <i>Jurnal Moderat</i> , 6(2), 237–244.	Memahami penilaian terhadap kebijakan Program Keluarga Harapan yang berlangsung di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.	Studi Pustaka dan Observasi Lapangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai cukup sukses dan efisien dalam upaya penanggulangan kemiskinan, meskipun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pelaksanaan program tersebut.
4.	Edu, E., & Rohman, A. (2019). <i>Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik</i> , 8(3), 67–74.	Mengetahui tentang penilaian PKH yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu, serta aspek pencegahan dan promotifnya.	Kualitatif deskriptif	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini mampu membantu penerima manfaat untuk mencapai kebutuhan dasar mereka sehingga dapat mengakhiri siklus kemiskinan.
5.	Sari, A. G., & Marom, A. (2022). <i>Journal Of Public Policy And Management</i> , 1–4.	Evaluasi mengenai hasil dari Program Keluarga Harapan serta faktor-faktor yang berperan dalam usaha mengatasi permasalahan pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam menangani masalah pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, belum dilakukan secara baik dan optimal.
6.	Sulfadli et al. (2023). <i>Development Policy and Management Review (DPMR)</i> .	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dampak dari Program Keluarga Harapan (PKH)	Kualitatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Alla, Kabupaten

		yang dilaksanakan di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.		Enrekang, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di desa tersebut. Meskipun demikian, program di lokasi penelitian ini tidak berhasil dalam memperkenalkan tingkat graduasi mandiri yang efektif.
7.	Sitepu, Yesi Artika Br. (2019). <i>Universitas Medan Area</i> .	Mengetahui evaluasi kebijakan program keluarga harapan yang dilaksanakan di Desa Minta Kasih.	Kualitatif	PKH tidak berjalan dengan optimal karena pemilihan penerima kesejahteraan di masyarakat tidak akurat. Dampak yang dihasilkan oleh PKH adalah memberikan bantuan pada perekonomian masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, sehingga para orang tua dapat memfasilitasi dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.
8.	Hadirianto, Thoyib et al. (2023). <i>Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi</i> .	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai evaluasi program Keluarga Harapan yang ada di Kabupaten Gresik.	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gresik belum sepenuhnya memenuhi indikator efektivitas, pemerataan, kecukupan, dan ketepatan. Namun, indikator efisiensi dan responsivitas telah menunjukkan kinerja yang cukup baik.
9.	Juniar, Trifandy et al. (2023). <i>Jurnal</i>	Tujuan dari penelitian ini	Kualitatif deskriptif	Disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di

	<i>Ilmu Pemerintahan.</i>	adalah untuk mendeskripsikan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Desa Tegalsari.		Desa Tegalsari belum memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kepatutan, pemerataan, dan ketepatan. Meskipun demikian, evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Tegalsari dianggap masih kurang optimal.
10.	Serliana, Jihan et al. (2024). <i>Jurnal Mahasiswa Soetomo Administrasi Publik.</i>	Penjelasan tentang evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Babat, Kabupaten Lamongan.	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Babat telah berlangsung dengan baik, yang terbukti dari adanya peningkatan dalam bidang pendidikan, gizi, dan kesehatan guna memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan tabel 1.6, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai masukan penelitian memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah memahami terkait evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu lokus penelitian dan teori penelitian.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik ialah studi tentang bagaimana pemerintah mengorganisasi negara untuk mencapai tujuan tegas. Orang-orang di dalamnya diorganisasikan dan digerakkan untuk mencapai proses pencapaian tujuan masyarakat (Ashari & Hariani, 2019). Administrasi Publik adalah semua tindakan

pemerintah yang menguntungkan masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah dan manajemen publik yang baik (Suparyanto dan Rosad, 2020), sedangkan administrasi publik didefinisikan oleh Henry (dalam Pasolong 2016:17), sebagai suatu perpaduan antara teori dan praktik yang kompleks untuk memahami hubungan pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya dan untuk mendorong berbagai kebijakan supaya dapat memenuhi kebutuhan sosial yang berbeda.

Program Keluarga Harapan dalam administrasi publik melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Administrasi publik bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Program Keluarga Harapan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program tersebut dalam mencapai tujuannya.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

1. Paradigma 1 Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Menurut paradigma dikotomi politik-administrasi terdapat dwifungsi administrasi publik, yaitu politik dan administrasi. Administrasi publik merupakan perpanjangan tangan politik dalam melaksanakan kebijakan yang sudah dirumuskan oleh politik.

2. Paradigma 2 Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma prinsip-prinsip administrasi kini tidak lagi memusatkan perhatian pada lokasi administrasi publik, melainkan lebih menekankan fokus administrasi publik, yang mengharuskan penerapan berbagai prinsip

administrasi, misalnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, disiplin, kerja sama, dan koordinasi..

3. Paradigma 3 Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Administrasi publik segera kembali ke induknya, yakni ilmu politik, sebagai tanggapan atas perhatian dan kritik konseptual. Akibatnya, birokrasi pemerintah sekali lagi ditetapkan sebagai lokus, tetapi perhatian dialihkan. Secara ringkas, tahap ketiga ini bertujuan mengembalikan hubungan konseptual antara ilmu politik dan administrasi publik.

4. Paradigma 4 Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Ilmu administrasi dan kajian tentang teori organisasi disatukan dalam istilah ilmu administrasi. Ilmu administrasi menawarkan fokus yang dianggap relevan dengan domain perusahaan dan administrasi publik sehingga membuat tempatnya di dalam kedua domain ini menjadi ambigu.

5. Paradigma 5 Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990)

Paradigma administrasi publik, atau administrasi publik, memiliki lokasi dan tujuan yang berbeda. Menurut paradigma ini, administrasi publik berpusat pada kebijakan publik, teori manajemen, dan teori organisasi. Sementara itu, lokasi dalam paradigma ini adalah seputar masalah dan kepentingan publik.

6. Paradigma 6 Administrasi Publik sebagai *Governance* (1990an)

Paradigma terakhir ini menunjukkan bahwa sebelum era *governance*, perhatian utama terfokus pada pemerintah dan seringkali mengabaikan peran penting sektor swasta dan masyarakat. Namun, paradigma *governance*

menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor, bukan hanya pemerintah dalam mengelola urusan negara.

Pada penelitian ini, yaitu “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Pendidikan di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo” termasuk pada paradigma kelima, yakni Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, karena fokus dan lokusnya jelas. Fokus penelitian ini terletak pada kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan PKH, khususnya dalam upaya meningkatkan pendidikan. Lokusnya adalah masalah-masalah publik, yaitu apakah PKH membantu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi keluarga penerima manfaat.

1.6.4 Kebijakan Publik

Pernyataan dari Fredrich (dalam Agustino 2017:166), Kebijakan merupakan sekumpulan tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks situasi tertentu. Ini dimaksudkan untuk mengatasi peluang dan tantangan yang diantisipasi agar dapat mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, Anderson (dalam Agustino 2017:17) memberitahukan bahwasanya serangkaian langkah yang diambil dan dilakukan oleh individu atau kelompok aktor untuk mengatasi masalah tertentu dikenal sebagai kebijakan publik.

Program Keluarga Harapan ialah langkah pemerintah dalam menyediakan bantuan kepada keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan rentan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan terutama dalam aspek pendidikan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 yang berkaitan dengan

Program Keluarga Harapan. Sasaran utama dari kebijakan ini ialah menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga yang berada dalam keadaan rentan.

1.6.5 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik adalah salah satu tahap akhir dalam tahapan kebijakan publik. Proses evaluasi ini sering kali dilakukan untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan telah berhasil mencapai hasilnya dengan melakukan perbandingan hasil yang didapatkan dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Pramono, 2020). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan merupakan suatu penilaian terhadap berbagai kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati, yang bertujuan untuk memperkirakan seberapa jauh kebijakan tersebut berhasil menjangkau tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk meninjau dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan di masa mendatang (Pramono, 2020).

Merujuk pada beberapa definisi yang telah disebutkan, evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses penilaian yang bertujuan untuk memahami keberhasilan serta kegagalan yang timbul akibat pelaksanaan suatu kebijakan publik. Setiap kebijakan yang disusun oleh pemerintah harus dievaluasi guna memastikan apakah kebijakan tersebut telah mewujudkan tujuan yang direncanakan sebelumnya. Program Keluarga Harapan ialah kebijakan yang telah dikembangkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 dengan tujuan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini agar tujuan yang diharapkan dapat benar-benar tercapai.

1.6.6 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah kebijakan dibutuhkan berapa kriteria. Teori dari Bridgman & Davis (dalam Lintjewas et al., 2016) meliputi 4 kriteria evaluasi di antaranya, yaitu *Input*, *Process*, *Output*, dan *Outcomes* yang digunakan untuk kriteria dari pelaksanaan kebijakan yang akan dievaluasi atau dinilai. Penelitian ini hanya menggunakan kriteria evaluasi, yaitu *Output* (Hasil) karena peneliti hanya berfokus pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan.

a. *Input*

Mengutamakan untuk memeriksa ketersediaan bahan dasar dan sumber daya yang dipergunakan untuk menerapkan kebijakan tersebut, seperti tenaga kerja, dana, dan infrastruktur pendukung lainnya.

b. *Process*

Mengutamakan pada penilaian ataupun pengukuran sejauh mana suatu kebijakan dialihkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

c. *Output*

Mengutamakan penilaian hasil capaian dari sebuah program yang telah dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah.

d. *Outcomes*

Mengutamakan bagaimana manfaat maupun dampak program kebijakan. Apakah diterima dengan baik oleh masyarakat atau kelompok sasaran ataupun sebaliknya.

1.6.7 Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH) diciptakan untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga-keluarga yang telah teridentifikasi sebagai penerima manfaat. Keluarga-keluarga ini terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, yang menunjukkan bahwa mereka berada dalam kondisi miskin dan rentan. Dengan program ini, diharapkan bantuan yang diberikan dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. PKH tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga berupaya memberdayakan keluarga agar dapat lebih mandiri dan sejahtera di masa depan (Permensos, 2018).

Salah satu strategi yang ditempuh oleh pemerintah sebagai bentuk mempercepat pengentasan kemiskinan, yakni melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang untuk menghentikan siklus kemiskinan yang sering kali berulang dari generasi ke generasi. PKH merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat yang fokus pada peningkatan kualitas hidup bagi keluarga-keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya program ini, keluarga-keluarga tersebut diberikan kesempatan untuk mengakses layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan dengan lebih baik. Harapannya, melalui PKH, mereka tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga dukungan untuk meningkatkan taraf hidup dan memutus rantai kemiskinan yang telah ada.

Program Keluarga Harapan memiliki beberapa tujuan, yakni: 1) Menekan beban biaya serta mengupayakan peningkatan pendapatan bagi keluarga-keluarga miskin dan rentan dalam upaya menanggulangi kemiskinan; 2) Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera, sangat penting untuk mengubah perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam memperoleh layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Program Keluarga Harapan (PKH) menetapkan beberapa kriteria bagi penerima manfaat di sektor pendidikan. Kriteria ini mencakup anak-anak yang berada dalam usia sekolah dasar, anak-anak yang bersekolah di tingkat menengah pertama, serta siswa yang sedang menjalani pendidikan di sekolah menengah atas. Selain itu, program ini juga mencakup anak-anak berusia antara 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun. Dengan adanya kriteria ini, diharapkan lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera dapat mendapatkan akses ke pendidikan yang layak sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan pada tahap awal, dilakukan sebagai penentuan lokasi serta jumlah calon penerima manfaat PKH. Penentuan ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan sumber data penting untuk mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan bantuan.

2. Validasi, data pemohon PKH dibandingkan dengan bukti dan fakta yang ada untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan. Proses ini untuk memastikan akurasi data dan keadilan dalam penyaluran bantuan.
3. Penetapan, berdasarkan hasil dari proses validasi telah ditetapkan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Penetapan ini juga melibatkan verifikasi komitmen dari calon penerima manfaat dan pembaruan data jika diperlukan.
4. Penyaluran bantuan, bantuan sosial tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai, melainkan melalui KKS maupun melalui buku tabungan. Ini bertujuan untuk memudahkan akses dan pengelolaan dana oleh keluarga penerima manfaat.
5. Pendampingan diberikan kepada keluarga penerima manfaat untuk membantu mereka dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta mendorong perubahan perilaku dan kemandirian dalam mengelola kehidupan sehari-hari.

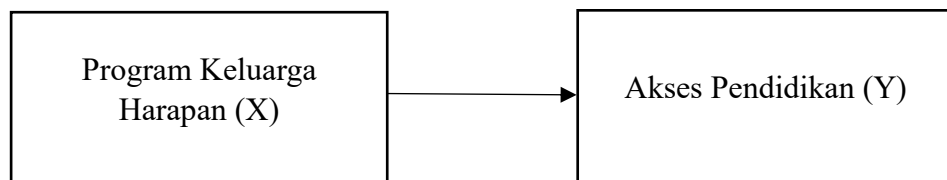
1.6.8 Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan kesadaran dan perencanaan untuk memberikan bimbingan serta dukungan kepada peserta didik. Tujuannya membantu peserta didik mengembangkan potensi fisik dan mentalnya sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang dewasa, mandiri, dan mampu menjalani kehidupan serta tanggung jawabnya dengan baik (Hidayat & Abdillah, 2019). Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan dengan kesadaran dan persiapan yang matang guna

menghasilkan lingkungan belajar mendukung dan proses pembelajaran yang bermanfaat bagi para peserta didik. Diharapkan siswa dapat secara aktif menyempurnakan potensi dirinya melalui pendidikan, yang mencakup berbagai elemen seperti kontrol diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, kualitas spiritual keagamaan, dan keahlian yang bermanfaat bagi dirinya, kelompoknya, bangsanya, dan negaranya. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses yang dirancang dan direncanakan untuk meningkatkan potensi siswa secara fisik, mental, spiritual, dan keterampilan sehingga mereka dapat menjadi individu yang mandiri, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi kepada masyarakat, negara, dan diri mereka sendiri.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah Penulis, 2024

1.8 Definisi Konsep

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka definisi konsep dari variabel penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan adalah bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan. PKH bertujuan agar anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap bisa bersekolah dan tidak putus di tengah jalan karena kendala ekonomi. Dengan adanya PKH, diharapkan keluarga memiliki motivasi dan dukungan untuk mendorong anak-anak mereka mencapai pendidikan yang lebih tinggi.
2. Akses Pendidikan adalah kesempatan yang dimiliki oleh setiap anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, baik di sekolah formal maupun nonformal. Akses ini mencakup kemudahan untuk masuk sekolah, ketersediaan fasilitas belajar yang memadai, dan dukungan dari keluarga dan lingkungan. Akses pendidikan yang baik memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosialnya sehingga memiliki peluang yang sama untuk belajar dan berkembang.

Dengan memberikan bantuan dalam bentuk tunai bersyarat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan meningkatkan akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo

diukur melalui indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis (dalam Lintjewas et al., 2016), yaitu *Output* (Hasil).

1.9 Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konsep yang telah dijelaskan, maka definisi operasional dari variabel penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (X)

Variabel	Indikator	Skala
Program Keluarga Harapan	Dana bantuan Program Keluarga Harapan bisa untuk mengurangi beban pengeluaran	Guttman

2. Akses Pendidikan (Y)

Variabel	Indikator	Skala
Akses Pendidikan	Kemudahan Keluarga Penerima Manfaat dalam mendapatkan akses layanan pendidikan	Guttman

Selain indikator-indikator yang sudah disebutkan sebelumnya untuk evaluasi Program Keluarga Harapan, terdapat juga berbagai masalah yang ada ketika pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi rintangan yang menghalangi keberjalanan PKH, serta untuk mengevaluasi apakah permasalahan yang dihadapi juga terjadi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pada hasil penelitian terdahulu ditemukan bahwa hambatan yang sering terjadi antara

lain kendala teknis seperti proses pencairan dana yang terlambat, terdapat warga yang belum tepat dalam penggunaan dana bantuan sebagaimana mestinya.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif ialah jenis penelitian yang memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel sebagaimana adanya, yang diperkuat oleh data numerik yang dihasilkan dari keadaan yang sesungguhnya. Penelitian deskriptif kuantitatif memiliki tujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas dan mendetail mengenai data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pada data yang ada. Metode penelitian deskriptif kuantitatif yang penelitian ini terapkan mempunyai tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, serta menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi Program Keluarga Harapan di wilayah tersebut melalui penyebaran angket kepada responden.

1.10.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan daerah kumpulan objek atau subjek yang memiliki atribut dan sifat tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. untuk dianalisis guna menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Populasi yang menjadi subjek penelitian ini mencakup semua keluarga penerima manfaat yang telah

terdaftar sebagai penerima PKH di wilayah Kecamatan Polokarto, yaitu sebesar 3761 peserta.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian representatif untuk mewakili populasi karena masing-masing penelitian mempunyai keterbatasan sumber daya, seperti waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak mungkin peneliti dapat mengumpulkan data dari seluruh populasi (Amruddin et al., 2022). Dalam penelitian ini, penentuan ukuran sampel mengacu pada penjelasan Roscoe (dalam Sugiyono, 2018), yang memberitahukan bahwasanya ukuran sampel yang ideal berkisar antara 30 hingga 500, sesuai dengan kebanyakan penelitian. Selain itu untuk penulis juga menggunakan rumus Slovin dalam menentukan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Rincian:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e^2 = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir sebesar 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar.

Maka:

$$n = \frac{3761}{1 + 3761(0,1)^2}$$

n = 97, 40 dibulatkan menjadi 100 responden

Maka dari itu, pada penelitian ini, sampel terdiri dari 100 responden yang merupakan keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan.

1.10.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang diusulkan oleh Margono (2004) memberikan panduan tentang bagaimana menghitung jumlah sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Dalam metode ini, penting untuk mempertimbangkan karakteristik dan distribusi populasi agar sampel yang diperoleh dapat mewakili keseluruhan populasi dengan baik. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat meyakinkan bahwa data yang dikumpulkan akan akurat dan relevan sehingga hasil penelitian dapat diandalkan untuk memberikan wawasan yang bermanfaat. Salah satu cara pengambilan sampel yang diterapkan ialah *purposive sampling*, yakni metode maupun pendekatan untuk memilih sampel yang dinamakan kelompok sampel tersebut memiliki kriteria tertentu (Sugiyono, 2012:118). Pada penelitian ini, kriteria sampelnya yaitu penerima PKH yang masih mendapatkan komponen pendidikan.

1.10.4 Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Kuantitatif

Data kuantitatif ialah data yang disajikan berupa data angka dan bisa diukur secara objektif. Data ini memberikan gambaran yang jelas tentang jumlah frekuensi dan distribusi suatu fenomena. Data kuantitatif bisa diukur, diberi nilai numerik,

dan dihitung. Menyajikan informasi dalam bentuk angka-angka yang diperoleh dari hasil penyebaran angket.

b. Kualitatif

Data kualitatif ialah informasi yang tersaji dengan bentuk deskripsi, narasi, dan kata-kata. Jenis data ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena, perilaku dan pengalaman manusia.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan menggunakan angket yang berisi berbagai pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan. Melalui proses ini, data primer berhasil diperoleh dari pengisian angket oleh para responden, yakni para penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Polokarto.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah jenis sumber informasi yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Artinya, data tersebut biasanya telah dikumpulkan dan diproses sebelumnya sehingga peneliti harus menganalisis dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk keperluan penelitian. Sumber data sekunder bisa mencakup dokumen, publikasi pemerintah, jurnal, buku, serta berbagai sumber pendukung lainnya. Pada penelitian ini, data sekunder didapatkan dari artikel, jurnal, dan publikasi dari pemerintah.

1.10.5 Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini, digunakan skala Guttman sebagai alat pengukuran. Skala ini dirancang untuk memberikan jawaban yang jelas dan tegas berkaitan dengan pertanyaan atau masalah yang diajukan (Sugiyono, 2018). Jawaban yang diberikan dapat tegas dalam bentuk setuju-tidak setuju, ya-tidak, benar-salah, dan sebagainya. Skala Guttman juga bisa disusun dalam format pilihan ganda dan dalam bentuk centang.

Tabel 1. 7 Skala Gutmann

Jawaban	Bobot
Setuju	1
Tidak Setuju	0

Sumber: Sugiyono tahun 2018

Skor untuk jawaban tersebut dapat diberikan dengan rentang satu hingga nol. Sebagai ilustrasi, jawaban “setuju” diberikan bobot 1, sementara jawaban “tidak setuju” diberikan bobot 0. Dalam penelitian ini, skala Guttman diterapkan untuk memperoleh jawaban yang tegas dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada para responden.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Angket

Angket adalah teknik untuk mengumpulkan informasi atau data di mana peserta diberikan daftar pernyataan atau pertanyaan tertulis untuk diisi.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data dan informasi yang meliputi buku-buku, arsip, dokumen, data tertulis, serta gambar, untuk disusun dalam bentuk laporan dan informasi yang bisa memperkuat penelitian.

1.10.7 Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2012: 147) dalam penelitian kuantitatif, analisis data selalu dilakukan menggunakan metode statistik. Penelitian ini memanfaatkan statistik deskriptif yang dipergunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, dengan cara menggambarkan data tersebut sebagaimana adanya. Metode ini memberikan gambaran awal tentang karakteristik data, membantu peneliti memahami pola dan tren yang ada. Dengan menggunakan statistik deskriptif, peneliti dapat merangkum informasi dari data yang diperoleh sehingga hasilnya lebih mudah dipahami dan dapat memberikan dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai fenomena yang sedang diteliti.

1. Uji Validitas

Uji validitas menilai koefisien korelasi antara hasil dari suatu pertanyaan atau indikator dengan hasil keseluruhan variabel. Penentuan kelayakan item dilakukan melalui uji signifikansi koefisien korelasi pada tingkat signifikansi tertentu. Sebuah instrumen penelitian dapat dianggap valid apabila menggunakan nilai *pearson correlation* > nilai r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diterapkan untuk menilai seberapa konsisten atau akurat hasil dari pengukuran yang dilakukan. Secara singkat, uji ini bertujuan untuk menentukan tingkat konsistensi dari suatu angket. Sebuah instrumen penelitian dapat dianggap reliabel apabila menggunakan *Cronbach's alpha* dan mempunyai koefisien reliabilitas sejumlah 0,70 atau lebih.

3. Tabel Tunggal Persepsi Responden

Untuk analisis data berdasarkan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel tunggal persepsi responden yang terdiri dari:

- a. Pertanyaan penelitian.
- b. Skala guttman dengan skor 1 (setuju) dan 0 (tidak setuju).
- c. Frekuensi, merupakan jumlah banyaknya responden yang memilih pertanyaan.
- d. Persentase (%), yang diperoleh dari frekuensi pada masing-masing skala dibagi total frekuensi dikalikan 100%.